

Ketika Tafsir Menjadi Alat Kekuasaan: Studi Atas Ayat- Ayat Politik

Mohammad Komarudin¹, Ahmad Kafiyy², Moh. Salman Alfaruq³, Ahmad Atfhan Ahlul Khoir⁴.

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹²³⁴

Email: komarodinmohammad@gmail.com¹, kafiyyahmad@gmail.com², agosbunder71@gmail.com³, atfhan444k@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of Quranic interpretation, positioned as a tool of power in the political realm, particularly through the interpretation of political verses. Interpretation, which should be a means of spiritual and moral understanding, has historically often become an instrument of legitimacy for certain regimes or groups. The research uses qualitative methods with a library research approach, examining various works on Quranic interpretation and related literature on the relationship between interpretation and politics, both in classical and contemporary periods, focusing on the case of Indonesia. The results show that Quranic interpretation is often used by those in power to strengthen policy legitimacy, reinforce ideological narratives, and even restrict divergent religious expressions. Interpretation becomes a field for contestation of meaning between diverse political and religious groups, making it vulnerable to bias and potentially leading to social polarization. This study highlights the strong influence of power on the construction of meaning in interpretation, making religious interpretation vulnerable to monopolization and misuse for the pragmatic interests of those in power. This study also emphasizes the need to develop critical, inclusive interpretations free from the intervention of those in power, so that interpretation maintains its function as a moral and ethical enlightener, rather than simply a tool for political propaganda. This research is expected to foster critical awareness in understanding the interpretation and contextualization of political verses, for the sake of a more just and democratic harmony in religious and national life.

Keyword : *Quranic interpretation, power, political verses, legitimacy, Islamic politics, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena tafsir Al-Qur'an yang diposisikan sebagai alat kekuasaan dalam ranah politik, khususnya melalui penafsiran atas ayat-ayat politik. Tafsir yang seyogianya menjadi sarana pemahaman spiritual dan moral, dalam sejarahnya sering kali berubah menjadi instrumen legitimasi bagi rezim atau kelompok tertentu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menelaah berbagai karya tafsir Al-Qur'an serta literatur terkait hubungan antara tafsir dan politik, baik pada masa klasik maupun kontemporer, dengan fokus kasus di Indonesia. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tafsir Al-Qur'an kerap kali digunakan oleh penguasa untuk memperkuat legitimasi kebijakan, meneguhkan narasi ideologis, hingga membatasi ekspresi keagamaan yang berbeda. Tafsir menjadi medan kontestasi makna antara kelompok politik dan agama yang beragam, sehingga rentan bias serta berpotensi menimbulkan polarisasi sosial. Studi ini menyoroti kuatnya pengaruh kekuasaan terhadap konstruksi makna dalam tafsir, sehingga interpretasi agama rawan dimonopoli dan disalahgunakan demi kepentingan pragmatis kekuasaan. Kajian ini juga menegaskan perlunya pengembangan tafsir yang kritis, inklusif, dan bebas dari intervensi kekuasaan, agar fungsi tafsir tetap terjaga sebagai pencerah moral dan etika sosial, bukan sekadar alat propaganda politik. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kritis dalam memahami tafsir dan kontekstualisasi ayat-ayat politik, demi harmoni kehidupan beragama dan berbangsa yang lebih adil dan demokratis.

Kata Kunci : *Tafsir Al-Qur'an, kekuasaan, ayat politik, legitimasi, politik Islam, Indonesia.*

Pendahuluan

Tafsir Al-Qur'an sebagai penjelasan dan pemaknaan ayat-ayat suci Al-Qur'an memegang peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Tafsir tidak hanya berfungsi sebagai sarana memahami teks agama, melainkan juga sebagai pijakan dalam menjalankan ajaran Islam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial dan politik. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, tafsir Al-Qur'an tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik yang melingkupinya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tafsir kerap kali digunakan sebagai instrumen atau alat kekuasaan demi melegitimasi atau memperkuat posisi politik tertentu. Dalam konteks Indonesia, dinamika tafsir dan kekuasaan politik menjadi sangat relevan untuk dipelajari karena negara ini memiliki keragaman sosial-politik dan keagamaan yang kompleks. Ayat-ayat Al-Qur'an sering kali diinterpretasikan dengan penekanan pada konteks dan kepentingan politik yang berlangsung saat itu. Sebagaimana dicatat dalam berbagai kajian, tafsir Al-Qur'an yang lahir dalam kondisi sosial-politik tertentu akan mencerminkan kontekstualisasi tafsir sesuai era atau rezim penguasa; misalnya, dalam tiga masa politik utama Indonesia pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. (Ahmad E.Q., 2020).

Ketika tafsir dijadikan alat kekuasaan, tafsir itu tidak lagi sebatas kajian keagamaan murni, tetapi berubah menjadi medium legitimasi ideologi politik. Tafsir sering dipakai untuk menjustifikasi kebijakan, menentang oposisi, bahkan menata ulang struktur sosial-politik agar selaras dengan kepentingan elit penguasa. Hal ini juga merupakan manifestasi adanya keterikatan antara kekuasaan dan pengetahuan yang dijelaskan oleh Michel Foucault; tafsir sebagai 'pengetahuan' diseleksi dan direproduksi sedemikian rupa agar mendukung 'kekuasaan' yang ada. Dengan kata lain, tafsir tidak netral, melainkan produk yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan ideologi dan politik tertentu. Pemanfaatan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks politik tidak hanya terjadi dalam sejarah klasik Islam seperti pelegitimasi suksesi kepemimpinan Abu Bakar yang disokong sejumlah ayat tertentu, tetapi terus berkembang hingga saat ini. Misalnya, dalam sejarah Indonesia, tafsir atas ayat-ayat politik sering digunakan untuk menguatkan rezim tertentu atau mendiskreditkan kelompok lain (Al-Farmawiy, 1977). Dalam konteks Orde Baru, tafsir keagamaan dipergunakan untuk mendukung kebijakan negara yang otoriter dan mengakomodasi label Islam sebagai alat kontrol politik, termasuk kebijakan yang membatasi peran politik Islam dan membatasi ekspresi keagamaan yang berbeda dari garis pemerintah.

Lebih jauh, tafsir sebagai alat kekuasaan juga dapat dilihat dalam cara negara atau penguasa mendefinisikan dan mengatur hukum melalui tafsir yang mereka kontrol. Dalam hal ini, pembuat kebijakan berperan sebagai pemegang kekuasaan tafsir yang mengarahkan legalitas politik dan sosial. Tafsir menjadi "senjata" legitimasi hukum dan kontrol sosial, dan oleh sebab itu tafsir dapat dipakai untuk melegitimasi tindakan kekerasan atau kebijakan yang berat sebelah. Hal ini menimbulkan persoalan etis dan politik tentang siapa yang berhak menafsirkan dan untuk tujuan apa tafsir itu dipakai.

Studi tentang tafsir ayat-ayat politik perlu juga melihat pluralitas tafsir yang muncul dari berbagai latar belakang ideologi dan mazhab keagamaan. Setiap mufasir membawa perspektifnya sendiri, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebagai contoh, penafsiran atas ayat-ayat yang membahas legitimasi kekuasaan dapat berbeda antara Sunni, Syiah, dan kelompok lain; perbedaan ini

bukan saja aspek teologis, tapi juga berkaitan dengan keberpihakan politik yang beragam. Di Indonesia pun, kompleksitas ini semakin bertambah karena keragaman budaya dan politik. Dalam situasi kontemporer, tafsir politik terlihat jelas ketika agama dimobilisasi untuk mendukung kepentingan kekuasaan tertentu. Contoh nyata adalah berbagai gerakan politik yang menggunakan penafsiran tertentu untuk mengajak massa, membentuk opini publik, atau menjustifikasi posisi politik mereka (Asa, 2000). Penelitian tentang fenomena G 30 S PKI dan Aksi 212 menunjukkan bahwa tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dapat menjadi alat untuk mengonstruksi narasi politik dan memperkuat kekuasaan kelompok tertentu, yang kadang berujung pada polarisasi sosial dan konflik politik berbasis agama. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan keagamaan yang moderat agar tafsir tidak disalahgunakan demi kepentingan politik yang sempit. Selain itu, aspek etika sosial (*Adab Ijtima'i*) juga memengaruhi bagaimana tafsir politik dikembangkan dalam konteks kekuasaan di Indonesia. Etika sosial ini mengatur batas-batas dan cara penggunaan tafsir dalam ranah politik agar tidak menimbulkan kerusakan sosial dan konflik berkepanjangan. Namun realitas politik kerap membuat tafsir menjadi alat dominasi dan kontrol yang justru memperkuat kekuasaan rezim tertentu, terutama dalam rezim otoriter. (Husni, 2012)

Berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa tafsir tidak hanya tindakan keagamaan, melainkan bagian dari proyek politik kekuasaan. Dengan demikian, analisis tafsir ayat-ayat politik mesti memperhatikan konteks sosial-politik dan ideologis tafsir itu muncul. Studi seperti ini membuka pemahaman kritis terhadap peran tafsir dalam sejarah politik dan sosial umat Islam, khususnya di Indonesia yang sangat dinamis. Pemahaman ini juga penting sebagai landasan reformasi praktik keagamaan dan politik agar tafsir Al-Qur'an digunakan sebagai sarana dialog dan harmonisasi, bukan alat konflik kekuasaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan) karena objek penelitian adalah tafsir Al-Qur'an yang berfungsi sebagai kekuasaan dalam konteks ayat-ayat politik, yang dianalisis melalui sumber-sumber tertulis seperti buku tafsir, artikel ilmiah, dokumen sejarah politik, dan literatur terkait tafsir dan kekuasaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam hubungan antara tafsir dan kekuasaan politik tanpa harus melakukan observasi lapangan langsung. Metode penelitian ini memastikan kajian tafsir sebagai alat kekuasaan dalam ayat-ayat politik dapat dianalisis secara mendalam, kontekstual, dan kritis berdasarkan data kepustakaan yang komprehensif dan menggunakan pendekatan teoretik yang relevan. Jika diperlukan, teknik observasi atau wawancara bisa ditambahkan untuk pengayaan, namun studi pustaka sudah sangat memadai dalam tema ini yang berfokus pada teks dan konteks historis.

Hasil dan pembahasan

Tafsir Al-Qur'an sebagai praktik penafsiran teks suci bukan sekadar aktivitas keagamaan, melainkan juga rentan menjadi medium politik. Sejarah memperlihatkan bahwa tafsir kerap digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menegaskan dominasi politik dan mengukuhkan legitimasi rezim tertentu. Fenomena ini,

yang dapat disebut sebagai politisasi tafsir, menjadi sangat strategis karena ayat-ayat Al-Qur'an memiliki otoritas tinggi di kalangan umat Muslim sehingga penafsiran atasnya dapat membentuk kesadaran sosial dan politik massa. Pada awalnya, tafsir Al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas yang memenuhi kebutuhan umat Islam dalam memahami wahyu sesuai konteks zamannya, seperti terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang hanya memberi penafsiran berdasarkan pertanyaan langsung para sahabat. Namun, seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya keragaman sosial, penafsiran Al-Qur'an mulai memasuki wilayah yang lebih kompleks, termasuk bahasa dan kebudayaan non-Arab. Sayangnya, seiring perkembangan itu, tafsir mulai mengalami tekanan dari kepentingan politik penguasa yang ingin menggunakan ayat-ayat tertentu sebagai legitimasi kekuasaannya. Dalam konteks Indonesia, politisasi ini berkembang semakin nyata, terutama sejak era Orde Baru yang disebutkan dalam sejumlah kajian tafsir kontemporer. (Amin Abdullah, 2001).

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, penafsiran Al-Qur'an berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan umat yang mencari solusi atas persoalan hidup mereka. Tafsir pada masa itu bersifat situasional dan personal, diberikan langsung oleh Nabi ketika para sahabat mengalami kebingungan atau kesulitan memahami suatu ayat. Karena itu, jumlah ayat yang secara eksplisit ditafsirkan oleh Nabi tidaklah lengkap. Namun, ketika kekuasaan Islam mulai meluas ke wilayah non-Arab, kebutuhan akan pemahaman kebahasaan dan konteks baru mendorong lahirnya karya-karya tafsir yang lebih sistematis, seperti *Ma'āni al-Qur'ān* karya Muhammad bin Ali bin Sarah al-Ru'asi, dan tafsir-tafsir ulama lainnya yang berfokus pada aspek bahasa dan konteks sosial (Gusmian, 2014). Pada tahap ini, tafsir bervariasi sesuai kebutuhan masa kadang mengedepankan aspek hukum, sosial, atau budaya.

Namun, titik krusial terjadi saat tafsir mulai dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Penafsiran Al-Qur'an tidak lagi semata demi kepentingan umat secara luas, melainkan diarahkan atau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat posisi politik mereka. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai politisasi ayat Al-Qur'an, yang secara destruktif mengubah tafsir dari wahyu ilahi menjadi alat legitimasi semu untuk kekuasaan dan dominasi. Bahkan dalam beberapa kasus, politisasi ini melibatkan pemalsuan hadis demi mendukung tafsir yang ingin dipaksakan kelompok tertentu demi agenda politiknya.

Selama era Orde Baru, tafsir Al-Qur'an sering dijadikan alat kontrol ideologis oleh rezim otoriter yang hendak menata ulang hubungan antara Islam dan negara. Para mufasir yang menulis tafsir pada masa itu sering menghadapi tekanan untuk menyesuaikan tafsirnya dengan kepentingan rezim, misalnya legitimasi asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara. Tafsir yang lahir kala itu tercermin sebagai produk dialog kebijakan politik yang membatasi ekspresi keislaman yang dianggap subversif atau bertentangan dengan stabilitas rezim. Pada saat yang sama, tafsir juga menjadi medium perlawanan intelektual umat Islam yang mencoba mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umat, seperti kebijakan larangan jilbab, atau pembatasan aktivitas ormas Islam. Dalam hal ini, tafsir Al-Qur'an bukan hanya sekadar produk teks, melainkan termasuk dalam ranah pengetahuan yang dipengaruhi oleh kekuasaan (power/knowledge) sebagaimana dikaji oleh Michel Foucault. Kekuasaan tidak hanya menekan tetapi juga membentuk bagaimana tafsir diproduksi, disebarkan, dan diterima. Dengan kata lain, tafsir dapat menjadi instrumen dominasi ideologi yang melegitimasi tindakan politik tertentu, sekaligus membatasi alternatif pemahaman

yang berpotensi menantang status quo. Fenomena tafsir sebagai alat kekuasaan ini juga menimbulkan problematika etis dan keilmuan. Ketika tafsir dibuat demi kepentingan politik, maka kebenaran dan objektivitas tafsir menjadi terancam. Kebenaran penafsiran dapat dipinggirkan demi pencapaian tujuan politik tertentu, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pemalsuan hadis terkait ayat-ayat politik untuk memperkuat klaim tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa tafsir dapat diselewengkan dan dimanipulasi sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai petunjuk bagi umat secara universal, berubah menjadi alat propaganda kelompok tertentu (Sunarto, 2019).

Indonesia menjadi contoh menarik dalam kajian tafsir sebagai alat kekuasaan, terutama pada masa rezim Orde Baru (1966– 1998). Dalam rezim ini, tafsir Al-Qur'an berfungsi sebagai medium ideologis untuk mendukung stabilitas politik otoriter sekaligus meredam potensi oposisi dari kelompok Islam yang dianggap mengancam kekuasaan. Menurut kajian Islah Gusmian, praktik penulisan tafsir pada masa Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik dan kebijakan negara yang ingin mendewasakan ormas keagamaan yang kooperatif dengan rezim, sementara membatasi ekspresi Islam yang kritis. Tafsir yang dipublikasikan dalam periode ini cenderung memiliki karakteristik yang memperkuat legitimasi negara dengan cara menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam narasi yang sesuai dengan asas tunggal Pancasila, program pembangunan, dan kebijakan lainnya yang sejalan dengan kepentingan rezim (Taryudi, 2021). Misalnya, tafsir yang menonjolkan ketertiban sosial, ketaatan kepada negara, dan kebersamaan antarumat beragama dengan penafsirannya dianggap memudahkan negara mengontrol dinamika sosial agama. Pada saat yang sama, ada pula tafsir yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang memberatkan umat Islam, namun secara umum ranah tafsir sangat terkontrol dan dimonitor oleh penguasa agar tidak menjadi sumber perlawanan. Lebih jauh, rezim Orde Baru juga memberlakukan kebijakan represif seperti larangan jilbab di beberapa sekolah negeri, depolitisasi ormas Islam, dan pembatasan aktivitas dakwah politik. Tafsir Al-Qur'an dalam konteks ini dipakai untuk membentuk opini agar umat Islam menerima kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Seiring dengan itu, tafsir ayat-ayat politik juga menjadi arena kontestasi pemaknaan antar kelompok-kelompok keagamaan dan politik yang berbeda pandangan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teologis, tapi juga bernuansa politik. Contoh nyata adalah tafsir yang berbeda-beda antara Sunni dan Syiah, atau kelompok Islam moderat dan konservatif; tafsir menjadi simbol dan instrumen perjuangan politik mereka. Di Indonesia, pluralitas tafsir juga berkembang mengikuti pluralitas sosial dan politik nasional, di mana tafsir Al-Qur'an dipakai sebagai alat legitimasi bagi berbagai kepentingan politik dan sosial. Selain itu, tafsir politik membantu membangun narasi negara dan agama yang secara pragmatis menata hubungan keduanya. Misalnya, tafsir al-Mishbah yang sangat populer di Indonesia, menampilkan dualisme legitimasi kekuasaan antara usaha rasional (kebijakan dan perundangan) dan suprarasional (dimensi ritual agama). Narasi ini memberikan justifikasi kepada pemerintah bahwa negara dianggap berjalan sesuai tuntunan agama apabila para pemimpin menjalankan ritual ibadah secara tertib. Model tafsir ini menjadi dasar pendekatan pragmatis hubungan agama dan negara yang memfokuskan aspek formal ritual dan legitimasi politik. Ketika tafsir dijadikan alat legitimasi politik, ia juga berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan hukum negara. Tafsir mengintervensi pembentukan norma dan kebijakan, sehingga tafsir menjadi

bagian dari struktur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini terlihat dari bagaimana tafsir digunakan untuk melandasi undang-undang dan kebijakan pemerintah di Indonesia yang bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, tafsir menjadi medium pengontrol sosial yang memperkuat otoritas pemerintah sekaligus membatasi ruang gerak oposisi politik dan sosial yang berangkat dari interpretasi lain. Dalam konteks global, penggunaan tafsir Al-Qur'an sebagai alat politik bukan fenomena baru. Beberapa mufasir klasik dan kontemporer juga dipengaruhi agenda politik saat menafsirkan, misalnya Tafsir al-Kasyaf karya Zamakhsyari yang dipengaruhi pandangan Mu'tazilah dan dipakai untuk kepentingan teori dan politik tertentu. Begitu pula dalam konteks pemerintahan Raja Abdul Majid Khon, tafsir Al-Alusi mendapat restu dari penguasa yang melihat tafsirnya mendukung legitimasi kekuasaan monarki. Ini membuktikan bahwa tafsir secara historis memang selalu terkait erat dengan relasi kekuasaan. (Wahid, 2017)

Pada masa modern, politisasi tafsir semakin diperkuat oleh politik identitas. Ayat- ayat yang berpotensi membentuk identitas dan solidaritas politik sering digunakan untuk memobilisasi massa, membentuk opini, dan menjustifikasi tuntutan kelompok tertentu. Misalnya, tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, keadilan, atau jihad sering mengalami penafsiran yang dikontrol oleh penguasa atau kelompok elite yang berkepentingan membentuk narasi dominan guna memperkokoh posisi mereka dalam arena politik. Namun, tafsir yang sarat politisasi ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti polarisasi sosial dan konflik berbasis identitas agama. Tafsir dapat memperuncing perbedaan kelompok dengan tafsiran yang saling bertentangan, memperkuat eksklusivitas kelompok, dan melahirkan intoleransi (Zulaiha, 2021). Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya politisasi tafsir menjadi penting, sekaligus membutuhkan pengembangan tafsir yang kritis, inklusif, dan dialogis guna menghindari penyalahgunaan agama dalam arena kekuasaan.

Secara praktis, pengelolaan tafsir yang tidak memihak kekuasaan memerlukan integritas keilmuan dan prinsip keterbukaan. Para mufasir perlu menyadari bahwa tafsir bukan hanya masalah teknis keagamaan, tapi juga politis dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutik kontekstual dan kajian multidisipliner sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan agama dan politik sehingga tafsir dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi masyarakat dan bukan alat dominasi.

Simpulan

Berdasarkan analisis pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya Tafsir Al-Qur'an memiliki posisi sentral dalam kehidupan umat Islam. Namun, dalam konteks politik, tafsir sering berubah fungsi dari sekadar instrumen pemahaman spiritual menjadi alat strategis kekuasaan. Perjalanan sejarah membuktikan tafsir kerap dijadikan sarana untuk mendukung legitimasi dan agenda politik tertentu, baik oleh rezim maupun kelompok politik yang ingin memperkuat posisinya. Fenomena ini sangat nyata, salah satunya di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, ketika tafsir diproduksi, disebarluaskan, dan dimonitor mengikuti arah kepentingan negara.

Beberapa poin kunci yang menandai fenomena tafsir sebagai alat kekuasaan antara lain: Tidak pernah terlepas dari konteks sosial-politik. Tafsir senantiasa dipengaruhi dinamika kekuasaan, peraturan negara,

bahkan figur-figur ideologis di sekitarnya. Penulisan tafsir pada era Orde Baru, misalnya, diwarnai oleh dorongan untuk melekatkan nilai- nilai Pancasila, menjaga stabilitas nasional, serta membatasi ekspresi keagamaan yang dianggap mengancam ideologi penguasa; Tafsir menjadi corong legitimasi kebijakan negara dan penguasa. Banyak karya tafsir sengaja diedarkan untuk mendukung kebijakan depolitisasi agama, mengukuhkan kedudukan negara di atas agama, serta menyelaraskan hukum positif dengan pelbagai ayat Al-Qur'an mengenai politik dan pemerintahan. Hal ini tampak dalam contoh pelarangan jilbab di sekolah hingga pengaturan penyelenggaraan porkas yang dibingkai dengan justifikasi tafsir; Tafsir juga menjadi arena kontestasi suara. Ia bisa memuat suara perlawanan terhadap rezim atau justru menjadi alat kontrol untuk membungkam kritik. Tafsir yang lahir dari tekanan atau persetujuan rezim biasanya memperkuat narasi agama-negara yang pragmatis dan cenderung mempertahankan status quo.

Studi ini menegaskan bahwa tafsir Al- Qur'an akan senantiasa bersinggungan dengan kekuasaan. Ia bisa memperkuat atau mendobrak legitimasi rezim tergantung siapa yang memproduksi dan menguasai tafsir, serta dalam konteks sosial apa ia beredar. Di Indonesia, relasi tafsir dan kekuasaan sangat dinamis, namun mengandung risiko besar: ketika tafsir dibiarkan tunduk pada kepentingan sempit politik, agama kehilangan daya transformasi etis-kritisnya dan masyarakat dihadapkan pada penyeragaman narasi yang justru rawan konflik. Diperlukan kesadaran kritis, penguatan integritas keilmuan, serta pembukaan ruang dialog dalam praktik penafsiran agar tafsir tetap menjadi sumber nilai dan keadilan, bukan sekadar alat propaganda kekuasaan.

Daftar Rujukan

- Ahmad E.Q., N. &. (2020). Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah. *Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Al-Farmawiy, A. A.-H. (1977). Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah,. *Cairo: Tauzi 'Maktabah Jumhuriyyah Misr*.
- Amin Abdullah. (2001). "al-Ta'wīl al-'Ilmī : Kearah Perubahan Paradigma penafsiran kitab suci. *Al-Jami'ah*, vol.39, No. 2.
- Asa, S. (2000). *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gusmian, I. (2014). Dialektika Tafsir Alquran dan Praktik Politik Rezim orde baru. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta*.
- Husni, A. a.-R. (2012). Masirah 'Ilm al-Tafsir min Manzhūr Syekh Muhammad al- Fadhl bin 'Ashur fi Kitabih: al-Tafsir wa Rijaluh. *Majalah al-Dirasat al- Qur'aniyyah*.
- Sunarto, S. (2019). Dinamika Tafsir Sosial di Indonesia. *Mumtaz: Jurnal Studi Al- Quran Dan Keislaman*, 3(1),.
- Taryudi, T. &. (2021). Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*,.
- Wahid, A. (2017). Sosial Politik dalam Tafsir HAMKA. *ARICIS PROCEEDINGS*,.
- Zulaiha, E. P. (2021). Selayang Pandang Tafsir Liberal di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualis*